

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah* . Jakarta :

Graha Ilmu, 2011.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*.

Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.

Kaloh, J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007

Mardiasmo, *Perpajakan Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi, 2011.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar BahasaIndonesia*.

Jakarta:Balai Pustaka, 1990.

Siahaan, Marihot Pahala , *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali

Pers, 2008.

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam*

Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah).Jakarta : PT Gramedia

Widiasarana, 2008.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta : Perpustakaan Nasional,

2006.

Widjaja, H. A. W., *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta : Rineka

Cipta, 1996.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah*

Daerah di Indonesia .Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan :

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,1998;8.

Perda kota Padangsidempuan No. 2 tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Padangsidempuan Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Putusan MA No 3416/Pdt/1985.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
Negara.

Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang –Undang Dasar 1945.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.34 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah.

Internet :

http://academia.edu./3102063/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah_Dalam_Rangka_Meningkatkan_Kemampuan_Keuangan_Daerah diakses 5 Maret 2014.

[http://Hukumonline.com/Motor Hilang di Parkiran, Siapa yang Bertanggung Jawab?](http://Hukumonline.com/Motor_Hilang_di_Parkiran,_Siapa_yang_Bertanggung_Jawab?) diakses pada 17 Desember 2013

[http://Id.m.wikibooks.org/Manajemen lalu lintas/Pengendalian parkir](http://Id.m.wikibooks.org/Manajemen_lalu_lintas/Pengendalian_parkir) diakses pada 29 Desember 2013.

<http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2012/01/06/optimalisasi-pendapatan-dari-retribusi-parkir-di-sidoarjo-428704.html> diakses pada 5 Maret 2014.

<http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2012/01/06/optimalisasi-pendapatan-dari-retribusi-parkir-di-sidoarjo-428704.html> diakses 5 Maret 2014.

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../Skripsi.pdf?> diakses pada 5 Maret 2014.

<http://www.metrosiantar.com/ms-berita/tabagsel.../page/13> diakses pada 5 Maret 2014.

